



EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PUBLIK DAN PEMBINAAN PKL DI SKYWALK TERAS CIHAMPELAS KOTA BANDUNG

Mohamad Naufal Ghazi¹⁾, Dadan Kurnia²⁾, Waluyo Zulfikar³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan penataan ruang publik serta pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Skywalk Teras Cihampelas, Kota Bandung. Skywalk yang diresmikan pada tahun 2017 ini dibangun sebagai bagian dari program penataan kawasan Cihampelas, dengan anggaran mencapai Rp48 miliar dan dilengkapi 192 kios yang dibagi ke dalam zona taman, kuliner, dan souvenir. Namun, beberapa tahun pascaoperasional, fasilitas ini menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat pemanfaatan. Data lapangan menunjukkan hanya 11 kios (5,73%) yang aktif beroperasi, sementara sisanya kosong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam kepada aparatur pemerintah, PKL, dan warga sekitar, observasi langsung, serta analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan awalnya. Hambatan meliputi lokasi yang kurang strategis, minimnya fasilitas pendukung, resistensi pedagang terhadap relokasi, serta lemahnya strategi promosi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revitalisasi fasilitas, peningkatan konektivitas kawasan, penguatan promosi berbasis potensi lokal, dan keterlibatan aktif PKL dalam proses perencanaan kebijakan.

Kata Kunci: kebijakan publik, penataan ruang, PKL, evaluasi kebijakan, Skywalk Teras Cihampelas

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness of the public space management policy and street vendor development at Skywalk Teras Cihampelas, Bandung City. The skywalk, inaugurated in 2017, was built as part of the Cihampelas area arrangement program with a budget of IDR 48 billion and equipped with 192 kiosks divided into garden, culinary, and souvenir zones. However, several years after its operation, the facility has shown a significant decline in utilization levels. Field data shows that only 11 kiosks (5.73%) are actively operating, while the rest remain vacant. This research employs a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews with government officials, street vendors, and local residents, direct observation, and analysis of relevant policy documents. The findings reveal that the

policy has not fully achieved its initial objectives. Obstacles include a less strategic location, lack of supporting facilities, resistance from vendors to relocation, and weak promotional strategies. The study recommends facility revitalization, improved area connectivity, strengthened promotion based on local potential, and active involvement of street vendors in policy planning processes.

Keywords: *public policy, space management, street vendors, policy evaluation, Skywalk Teras Cihampelas*

PENDAHULUAN

Skywalk Teras Cihampelas merupakan salah satu proyek ikonik Pemerintah Kota Bandung yang diresmikan pada awal tahun 2017 sebagai bagian dari program revitalisasi kawasan perkotaan. Proyek ini didesain sebagai infrastruktur penataan ruang publik modern yang berfungsi ganda: mengatasi kemacetan lalu lintas kronis di Jalan Cihampelas sekaligus menertibkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang selama bertahun-tahun menempati trotoar secara tidak teratur. Dengan panjang konstruksi mencapai sekitar 450 meter dan berada di ketinggian beberapa meter di atas permukaan jalan, Skywalk ini menghubungkan titik-titik strategis di kawasan wisata belanja Cihampelas, termasuk akses ke hotel, pusat perbelanjaan, dan gedung komersial.

Secara struktural, Skywalk Teras Cihampelas memiliki 192 kios yang terbagi ke dalam tiga zona utama: zona taman yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan area bersantai; zona kuliner yang menyediakan aneka makanan dan minuman khas Bandung; serta zona suvenir yang memasarkan kerajinan tangan, pakaian, dan cendera mata. Konsep penataan ini menggabungkan unsur rekreasi, ekonomi kreatif, dan fasilitas publik, dengan harapan mampu menjadi magnet wisata baru di Kota Bandung.

Pembangunan Skywalk ini dilandasi visi pemerintah untuk menciptakan ruang publik yang nyaman, aman, ramah pejalan kaki, dan mendukung ekonomi lokal. Penataan PKL di kawasan ini memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL serta Peraturan Wali Kota Nomor 888 Tahun 2012 sebagai aturan teknis pelaksanaannya. Kerangka hukum ini menegaskan bahwa penataan PKL bukan sekadar pemindahan lokasi,

tetapi juga pemberian fasilitas yang layak dan terintegrasi dengan pengembangan pariwisata kota.

Namun, setelah beberapa tahun beroperasi, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan serius. Tingkat okupansi kios mengalami penurunan drastis—dari awalnya hampir penuh, kini hanya tersisa sekitar 5–6% kios yang aktif, sebagian besar di sektor kuliner. Zona souvenir nyaris tidak berfungsi karena rendahnya jumlah pengunjung, dan banyak PKL yang direlokasi justru memilih kembali berjualan di trotoar atau area lain yang memiliki arus pembeli lebih stabil. Faktor-faktor penyebabnya meliputi kurangnya promosi, minimnya fasilitas penunjang seperti lift yang berhenti beroperasi, pencahayaan yang tidak optimal, serta tidak adanya konektivitas langsung dengan pusat perbelanjaan di sekitar Cihampelas.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 memperburuk situasi. Aktivitas wisata menurun tajam, daya beli masyarakat melemah, dan pembatasan sosial mengurangi jumlah pengunjung. Hal ini semakin memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Tujuan awal untuk menciptakan pusat ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan ruang publik belum tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan penataan Skywalk Teras Cihampelas, baik dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, maupun ketepatan, guna mengidentifikasi faktor penghambat dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang berbasis pada kebutuhan aktual masyarakat serta potensi kawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap paling sesuai untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena penataan ruang publik dan pembinaan PKL di Skywalk Teras Cihampelas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang melatarbelakangi kondisi di lapangan, serta menangkap dinamika yang terjadi dari sudut pandang berbagai pihak yang terlibat.

Lokasi penelitian ditetapkan di Skywalk Teras Cihampelas, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan selama periode Maret hingga Maret 2025, yang mencakup tahap persiapan instrumen, pengumpulan data di lapangan, dan verifikasi temuan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam implementasi kebijakan. Informan terdiri dari unsur pemerintah daerah, yakni Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (*Bappelitbang*), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Selain itu, peneliti juga mewawancarai pelaku usaha PKL yang berjualan di area skywalk maupun yang kembali ke trotoar, serta warga dan pengunjung kawasan Cihampelas. Secara keseluruhan, terdapat 12 informan kunci yang diwawancarai secara mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara mendalam menggunakan pedoman semi-terstruktur, untuk memperoleh informasi rinci terkait persepsi, pengalaman, dan evaluasi informan terhadap kebijakan penataan Skywalk Teras Cihampelas.
2. Observasi langsung di lapangan untuk mendokumentasikan kondisi fisik infrastruktur, tingkat okupansi kios, pemanfaatan fasilitas pendukung, serta pola interaksi antar pengguna ruang.
3. Studi dokumentasi berupa penelusuran dan analisis dokumen resmi seperti peraturan daerah, peraturan wali kota, laporan pelaksanaan program, arsip pembangunan, serta pemberitaan media yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn.

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah target yang telah ditetapkan dalam kebijakan telah berhasil direalisasikan secara menyeluruh?	Jumlah kios PKL yang digunakan dibandingkan total kios tersedia

Efisiensi	Seberapa besar upaya dan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan hasil kebijakan tersebut?	Perbandingan anggaran pembangunan dengan tingkat pemanfaatan fasilitas
Kecukupan	Sampai sejauh mana hasil yang dicapai berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus kebijakan?	Ketersediaan fasilitas penunjang (atap, akses, promosi) yang memadai bagi PKL dan pengunjung)
Perataan	Apakah manfaat dan beban kebijakan telah dialokasikan secara adil di antara kelompok masyarakat yang beragam?	Perbandingan pendapatan PKL yang direlokasi ke Skywalk dengan yang tetap berjualan di trotoar
Responsivitas	Apakah kebijakan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan, nilai, dan preferensi dari kelompok sasaran tertentu?	Tindakan pemerintah dalam merespon keluhan pedagang dan pengunjung terhadap fasilitas
Ketepatan	Sejauh mana hasil kebijakan memiliki nilai kegunaan yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat?	Kesesuaian konsep wisata belanja terbuka dengan preferensi pengunjung dan kondisi lingkungan sekitar

Untuk menjamin kredibilitas temuan, dilakukan triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil analisis lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan penataan ruang publik dan pembinaan PKL di Skywalk Teras Cihampelas. Analisis dilakukan dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Pendekatan ini dipilih untuk memberikan penilaian yang komprehensif terhadap sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta merespons kebutuhan masyarakat. Setiap kriteria dianalisis berdasarkan temuan lapangan yang bersumber dari perspektif berbagai pihak, meliputi unsur pemerintah daerah, pelaku PKL, dan pengunjung kawasan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah memberikan kerangka penataan yang jelas dan menyediakan fasilitas fisik, masih terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi keberhasilan pelaksanaannya. Beberapa di antaranya terkait rendahnya tingkat okupansi kios, kurangnya fasilitas penunjang, minimnya promosi, serta ketidaksesuaian desain dengan preferensi masyarakat.

Uraian berikut menyajikan hasil analisis untuk masing-masing kriteria evaluasi:

1. EFEKTIVITAS

Efektivitas kebijakan diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara nyata di lapangan. Tujuan utama penataan Skywalk Teras Cihampelas adalah memindahkan PKL dari trotoar ke fasilitas yang tertata rapi di atas jalan, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki di kawasan Cihampelas. Namun, hasil pengamatan dan data lapangan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai secara optimal. Dari total 192 kios yang tersedia, hanya 11 kios atau sekitar 5,73% yang masih aktif beroperasi. Mayoritas kios yang bertahan bergerak di sektor kuliner, sedangkan zona suvenir hampir sepenuhnya tidak berfungsi. Rendahnya arus pengunjung, terutama pada

hari kerja, membuat keberadaan skywalk tidak memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran lalu lintas maupun peningkatan pendapatan PKL. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum efektif dalam mewujudkan sasaran awalnya.

2. EFISIENSI

Efisiensi kebijakan mencerminkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Skywalk Teras Cihampelas dibangun dengan anggaran sekitar Rp48 miliar, angka yang tergolong besar untuk skala fasilitas publik kota. Harapannya, fasilitas ini mampu memberikan manfaat jangka panjang dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Namun, kenyataannya tingkat pemanfaatan kios sangat rendah dan tidak sebanding dengan biaya pembangunan. Sejumlah fasilitas pendukung, seperti lift, berhenti beroperasi hanya empat bulan setelah peresmian. Pencahayaan di beberapa titik padam, area taman kurang terawat, dan elemen estetika mengalami penurunan kualitas. Secara keseluruhan, biaya besar yang dikeluarkan tidak sejalan dengan manfaat yang dihasilkan, sehingga tingkat efisiensi kebijakan dapat dikatakan rendah.

3. KECUKUPAN

Kecukupan mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu menjawab permasalahan utama yang menjadi latar belakang pembuatannya. Meskipun skywalk menyediakan ruang berjualan yang tertata, fasilitas ini tidak dilengkapi peneduh memadai, ventilasi yang baik, dan akses yang terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan di sekitarnya. Minimnya promosi menyebabkan banyak pengunjung tidak mengetahui keberadaan atau potensi dari zona tertentu, khususnya zona souvenir. Akibatnya, kebijakan ini belum cukup memecahkan masalah pokok seperti rendahnya daya tarik bagi pengunjung dan minimnya keberlanjutan usaha PKL di area tersebut.

4. PEMERATAAN

Aspek pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat kebijakan secara adil di antara kelompok sasaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PKL yang dipindahkan ke skywalk umumnya mengalami penurunan pendapatan, sementara PKL yang tetap berjualan di trotoar justru mendapatkan arus pembeli lebih stabil. Hal ini memunculkan ketimpangan

manfaat antara pihak yang mengikuti kebijakan dan yang menolaknya. Selain itu, pengunjung dari luar daerah lebih cenderung menghabiskan waktu di pusat belanja besar di sekitar Cihampelas, yang memiliki fasilitas lengkap, dibandingkan naik ke area skywalk.

5. RESPONSIVITAS

Responsivitas menilai sejauh mana kebijakan mampu menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, respon pemerintah terhadap aspirasi PKL dan pengunjung cenderung lambat. Permintaan perbaikan fasilitas, penambahan atap pelindung, serta peningkatan promosi belum terealisasi secara signifikan. Meskipun ada beberapa upaya revitalisasi, seperti pengecatan ulang dan penambahan panggung pertunjukan, langkah-langkah ini belum menyentuh akar masalah, terutama terkait konektivitas, kenyamanan, dan keberlanjutan fungsi fasilitas.

6. KETEPATAN

Ketepatan mengacu pada kesesuaian desain kebijakan dengan karakteristik masalah yang ingin diselesaikan. Konsep Skywalk Teras Cihampelas sebagai destinasi wisata belanja terbuka kurang sesuai dengan preferensi masyarakat urban yang cenderung memilih ruang belanja tertutup (mall) yang lebih nyaman dan terlindung dari cuaca. Tidak adanya jalur langsung yang menghubungkan skywalk dengan pusat perbelanjaan sekitar membuat arus pengunjung terbatas. Dari sisi citra, hilangnya ikon patung superhero yang sebelumnya menjadi daya tarik visual kawasan turut mengurangi daya pikat skywalk sebagai ikon wisata Kota Bandung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan penataan ruang publik dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Skywalk Teras Cihampelas belum mencapai tujuan secara optimal. Dari aspek efektivitas, relokasi PKL dan peningkatan kenyamanan pejalan kaki tidak terwujud sepenuhnya karena rendahnya okupansi kios dan minimnya arus pengunjung. Efisiensi pembangunan juga rendah, mengingat besarnya anggaran tidak sebanding dengan pemanfaatan fasilitas. Dari sisi kecukupan, kebijakan belum mampu menjawab masalah utama seperti konektivitas, fasilitas pendukung, dan promosi. Perataan manfaat kebijakan tidak tercapai karena sebagian besar PKL yang direlokasi justru mengalami penurunan pendapatan, sementara PKL yang tetap di trotoar mendapatkan

lebih banyak pembeli. Tingkat responsivitas pemerintah dalam menangani keluhan pedagang dan pengunjung masih lambat dan belum menyentuh akar persoalan. Dari aspek ketepatan, konsep wisata belanja terbuka tidak sepenuhnya sesuai dengan preferensi pengunjung yang cenderung memilih area tertutup yang lebih nyaman. Secara keseluruhan, kebijakan ini memerlukan evaluasi lanjutan untuk memastikan kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Affrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan* (Cetakan-1). CV Bintang Semesta Media.
- Ahmadin, Kurniawan, A., Dey, N., & Awal, M. (2023). *Sosiologi Ruang Publik Perkotaan* (Ahmadin (Ed.); Cetakan-1). Widina Bhakti Persada Bandung.
<https://Repository.Penerbitwidina.Com/Media/Publications/560417-Sosiologi-Ruang-Publik-Perkotaan-9d5f2404.Pdf>
- Akbar, F., & Mohi, W. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia)* (M. Mirnawati & Y. Kamumu (Eds.)). Ideas Publishing.
- Astutik, Y. (2024). *Evaluasi Placemaking Pada Teras Cihampelas, Bandung*. SIAR-V.
- Citriadin, Y. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar* (Lubna (Ed.); Cetakan-1). Sanabil.
[https://Repository.Uinmataram.Ac.Id/1735/1/II.C.1 Buku Metode Penelitian_Yudin %281%29.Pdf](https://Repository.Uinmataram.Ac.Id/1735/1/II.C.1_Buku_Metode_Penelitian_Yudin%281%29.Pdf)
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyono (Ed.)). https://Press.Unisri.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2020/11/Naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi.Pdf
- Sardiyo, Rimbano, D., Famalika, A., Nadziro, N., & Diana, H. (2022). *Metodologi Penelitian* (R. Watrianthos (ed.); Cetakan Pe). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI).
- Suparman, U. (2020). *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?* (Pusaka Media Design (ed.)). Pusaka Media.
[http://repository.lppm.unila.ac.id/29565/1/E-Book - Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif.PDF](http://repository.lppm.unila.ac.id/29565/1/E-Book-BagaimanaMenganalisisDataKualitatif.PDF)

Jurnal:

- Assyakurrohim, D., Ikram, D., Sirodj, R., & Afgani, M. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Budiman, A., & Ilhamdaniah. (2024). Ruang Publik Teras Cihampelas: Antara Simbol Modernitas Atau Kegagalan Urbanisme? *Jurnal Desain Lingkungan Binaan Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.32315/JDLBI.v1i2.401>

- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>
- Hajaroh, M. (2018). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 11(1).
- Hasya, A., & Damayanti, V. (2022). Kajian Kinerja Teras Cihampelas sebagai Ruang Publik di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 2(2). [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3063771&val=27928&title=Kajian Kinerja Teras Cihampelas sebagai Ruang Publik Di Kota Bandung](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3063771&val=27928&title=Kajian%20Kinerja%20Teras%20Cihampelas%20sebagai%20Ruang%20Publik%20Di%20Kota%20Bandung)
- Mekarisce, A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3).
- Namira, M. F., Wipranata, B. I., & Tjung, L. J. (2022). Evaluasi Dan Peningkatan Pengelolaan *Skywalk* Sebagai Destinasi Wisata (Studi Kasus: Kawasan Cihampelas, Kota Bandung, Jawa Barat). *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(2), 3345. <https://doi.org/10.24912/stupa.v3i2.12869>
- Putri, M., Mefiana, N., Ambarwati, P., Hermawan, R., & Amira, Z. (2024). Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Lembang. *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan*, <https://pdfs.semanticscholar.org/962b/67686a9eabefc73a9b1fa26e98aa4baf5df0.pdf>
- Rahman, A., Madani, M., & Usman, J. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management* 3(1), 07–16. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.4901>
- Tasya, N., Nurasa, H., & Isnawaty, N. (2022). Evaluasi Program Relokasi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Teras Cihampelas Kota Bandung. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 13(2), 372–383. <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/viewFile/38232/17067>
- Trifita, A., & Amaliyah, R. (2020). Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Global and Policy Journal of International Relations*, 8(02). <https://doi.org/10.33005/jgp.v8i02.2413>
- Zahri, R., Mutaqi, A., & Rahmat, F. (2024). Revitalisasi Teras Cihampelas Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Adaptive Reuse. *Seminar Karya & Pameran Arsitektur Indonesia 2024*, 7(1). [https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/54600/81.Revitalisasi Si Teras Cihampelas Pasca Pandemi Covid-19.pdf?sequence=1](https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/54600/81.Revitalisasi%20Si%20Teras%20Cihampelas%20Pasca%20Pandemi%20Covid-19.pdf?sequence=1)

Skripsi/ Tesis:

- Alfiyah. (2020). *Peran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 Di Kecamatan Senapelan* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim].

[https://repository.uinsuska.ac.id/28298/1/Gabungan Skripsi Kecuali Bab Iv.pdf](https://repository.uinsuska.ac.id/28298/1/Gabungan_Skripsi_Kecuali_Bab_Iv.pdf)

Widiantoro, H. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Moda Transportasi Massal Trans Jogja Di Daerah Istimewa Yogyakarta* [Universitas Negeri Yogyakarta]. [https://eprints.uny.ac.id/18954/4/BAB 2 %2809417144044%29.pdf](https://eprints.uny.ac.id/18954/4/BAB_2_%2809417144044%29.pdf)

Internet:

Bagaskara, B. (2024). *Teras Cihampelas Riwayatmu Kini: Ditinggal Penghuni dan Sepi*. Detikjabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7600475/teras-cihampelas-riwayatmu-kini-ditinggal-penghuni-dan-sepi>

Muharam, Y. (2024). *Pedagang Kurang Diperhatikan, Teras Cihampelas Memprihatinkan*. Bandung Bergerak. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1598328/pedagang-kurang-diperhatikan-teras-cihampelas-memprihatinkan>

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. (2012). JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/167634/perwali-kota-bandung-no-888-tahun-2012>